



Media Title	Kompas		
Head Line	Komisi V DPR Tunggu Peraturan Presiden		
Date	18 Nov 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	20	Article Size	
Journalist	ARN	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

JALAN TOL TRANS-SUMATERA

Komisi V DPR Tunggu Peraturan Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Keseriusan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jalan bagi masyarakat di Sumatera disangsikan. Pasalnya, hingga kini payung hukum berupa peraturan presiden belum juga diterbitkan pemerintah. Padahal, jika peraturan presiden bisa keluar, pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera bisa segera dimulai.

Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Laurens Bahang Dama mengatakan, potensi dampak lanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dengan dibangunnya infrastruktur jalan sangatlah besar.

"Komisi V DPR yang membicarakan infrastruktur sangat berharap perpres (peraturan presiden) itu segera keluar. Kami terus mendorong dan meminta Presiden untuk serius menangani rencana besar jangka panjang. Kami sangat berharap akhir Desember ini perpres sudah bisa diterbitkan sehingga pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans-Sumatera) bisa dimulai tahun depan," kata Laurens, di Jakarta, Minggu (17/11).

Laurens menjelaskan, tidak ada masalah teknis ataupun pendanaan dalam melaksanakan pembangunan JTTS. Di bidang teknologi, badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah untuk membangun jalan tol ini sudah berpengalaman dan dapat membuktikan kehebatan dan keahliannya di bidang teknologi konstruksi. Jembatan Suramadu dan Jalan Tol Ngurah Rai-Benoa adalah bukti kemampuan bangsa dan BUMN dalam bidang konstruksi membangun jembatan dan jalan di atas laut.

Di bidang pendanaan, pemerintah juga sudah menganggar-

kan untuk pembiayaan awal pembangunan JTTS. Selain itu, perbankan nasional juga akan berpartisipasi dalam pembangunan.

"Tetapi, pemerintah tetap harus menjadi *trigger* untuk pendanaan awal. Setelah itu, perbankan nasional akan ikut serta. Selain perpres, pemerintah pusat juga perlu segera mencairkan dana penyertaan modal negara yang diperuntukkan sebagai modal awal BUMN yang diberi penugasan membangun dan mengoperasikan JTTS," ujar Laurens.

Sementara itu, peneliti senior Center for Information and Development Studies (CIDES), Umar Juoro, mengatakan, kondisi jalan-jalan di wilayah Sumatera saat ini sangat tidak memadai dan sudah tidak mampu lagi menanggung beban kendaraan yang melintas. Akibat kondisi jalan tersebut, ekonomi di Sumatera berbiaya sangat tinggi.

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang ada di Sumatera oleh sebagian masyarakat dianggap tidak melakukan apa-apa terhadap kerusakan jalan di wilayah Sumatera.

"Masyarakat sudah capek dan kesal sehingga akhirnya mereka banyak yang menghentikan kegiatan pengangkutan hasil alam dan hasil ekonomi di Sumatera. Kendaraan yang melintas dipaksa berhenti. Masyarakat menganggap angkutan ini menambah parah kerusakan jalan," kata Umar. "Sementara penghentian kegiatan ekonomi selain menimbulkan banyak pengangguran juga mengakibatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat makin menurun," lanjutnya. (ARN)